

KEANEKARAGAMAN SUKUBANGSA DI INDONESIA DAN MASALAH ETNISITAS

Hari Poerwanto*)

Pada akhir-akhir ini, di berbagai belahan dunia telah terjadi gerakan-gerakan kesukubangsaan, baik yang menuntut otonomi yang lebih luas maupun berupa gerakan kemerdekaan yang ingin memisahkan diri dari 'negara induknya' semula. Munculnya berbagai gerakan tersebut ada yang beranggapan merupakan indikasi bahwa proses menuju asimilasi dalam rangka suatu negara kesatuan yang lebih besar, telah mengalami hambatan atau kegagalan. Peristiwa runtuhnya negara adidaya Uni Soviet, konflik berkepanjangan di bekas negara Yugoslavia, pertentangan antara orang Tamil dan Sinhala di Srilangka, dan sebagainya; merupakan fenomena yang menandai akhir abad XX, termasuk berbagai konflik kesukubangsaan di Indonesia seperti yang terjadi di Ambon, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Berbagai kajian tentang kebudayaan suku-suku bangsa di Indonesia, disamping bersifat akademik, juga memiliki tujuan praktis. Secara akademik dimaksudkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan secara praktis salah satu manfaatnya adalah untuk kepentingan pembangunan dalam arti luas. Di masa penjajahan, pengetahuan mengenai suku-bangsa dan kebudayaan di Indonesia; pernah diterapkan untuk menguasai dan mengatur anak ne-

geri dalam rangka suatu sistem pemerintahan kolonial. Sebaliknya, setelah kemerdekaan pengetahuan tentang keanekaragaman suku-bangsa dan kebudayaan di Indonesia, merupakan bahan penting guna terwujudnya integrasi nasional di Indonesia.

Manusia dan kebudayaan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan, dan makhluk manusia merupakan pendukung kebudayaan. Sekalipun makhluk manusia mati, tetapi kebuda-

*) Guru Besar Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada.

wariskan kepada keturunannya, demikian seterusnya. Pewarisan kebudayaan makhluk manusia, tidak selalu hanya terjadi secara vertikal atau kepada anak-cucu mereka; melainkan dapat pula dilakukan secara horizontal atau manusia yang satu dapat belajar kebudayaan dari manusia lainnya. Berbagai pengalaman makhluk manusia dalam rangka kebudayaannya, akan diteruskan kepada generasi berikutnya atau dikomunikasikan dengan individu lainnya karena ia mampu mengembangkan gagasan-gagasannya dalam bentuk lambang-lambang vokal berupa bahasa; serta dikomunikasikan kepada orang lain dengan kepanandaiannya berbicara dan menulis.

Kebudayaan berkembang secara akumulatif, dan semakin lama bertambah banyak serta kompleks. Untuk meneruskannya dari generasi ke generasi, diperlukan suatu sistem komunikasi yang jauh lebih kompleks daripada yang dimiliki binatang, ialah berupa bahasa, baik lisan, tertulis maupun dalam bentuk bahasa isyarat. Agar suatu kebudayaan dapat merespon berbagai masalah kelangsungan hidup makhluk manusia dan tetap dipelajari oleh generasi berikutnya, serta tetap 'lestari'; maka suatu kebudayaan harus pula mampu mengembangkan

dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan pokok para individu.

Kebudayaan mengenal ruang, tempat tumbuh dan berkembang; serta mengalami perubahan; penambahan dan pengurangan. Manusia tidak berada pada dua tempat atau ruang sekaligus, dan ia hanya dapat pindah ke ruang lain pada masa yang berbeda. Pergerakan ini telah berakibat pada persebaran kebudayaan, dari masa ke masa, dan dari satu tempat ke tempat lain. Sebagai akibatnya, di berbagai tempat pada waktu yang bersamaan maupun berlainan, dimungkinkan adanya unsur-unsur persamaan di samping perbedaan-perbedaan. Karenanya itu di luar masanya, suatu kebudayaan dipandang ketinggalan zaman atau anakronistik, dan di luar tempatnya dipandang asing atau janggal.

Identitas masa dan ruang mempunyai makna penting dalam persoalan kebudayaan. Sebuah negara modern, yaitu *nation state* bukan hanya berwujud sebuah unit geopolitik semata, tetapi dalam kenyataannya senantiasa mengandung keragaman kelompok sosial dan sistem budaya yang tercermin pada keanekaragaman kebudayaan suku-bangsa dan *sub culture*. Melalui perjalanan sejarah,

berbagai proses kehidupan manusia telah melahirkan ciri keanekaragaman bentuk budaya.

Keanekaragaman kebudayaan di Indonesia, diperkaya oleh kehadiran pendukung kebudayaan dari bangsa-bangsa lain. Sejak berabad-abad yang lalu, karena penjajahan, hubungan perdagangan, penyebaran agama, eksploitasi kekayaan alam, dan untuk berbagai tujuan lain. Selain oleh orang Portugis dan Belanda, kawasan Nusantara telah didatangi oleh orang-orang dari Cina-Daratan, India dan Arab. Banyak di antara mereka itu, akhirnya menetap di Nusantara. Selama ratusan tahun keberadaannya di Nusantara; lahirlah generasi keturunan mereka yang sebagian besar kini telah menjadi warganegara Indonesia. Kehadiran mereka, di samping telah memperkaya kebudayaan di Indonesia dan merupakan suatu potensi yang bermanfaat dalam pembangunan; juga mengandung potensi konflik sehingga merupakan masalah dalam rangka mengasimilasikannya ke dalam suatu integrasi nasional di Indonesia.

Keanekaragaman Suku-Bangsa di Indonesia

Berbagai suku-bangsa di Indonesia, di samping dapat dibedakan berdasarkan sistem mata pencaharian hidupnya, juga da-

pat dibedakan menurut kompleksitas mereka (Koentjaraningrat, 1963). Berdasarkan sistem mata pencaharian hidupnya, ada enam klasifikasi, yaitu: a) masyarakat pemburu dan peramu atau *hunting and food gathering societies*; b) masyarakat peternak atau *pastoral societies*, c) masyarakat peladang atau *shifting cultivators societies*, d) masyarakat nelayan atau *fishing communities*, e) masyarakat petani-pedesaan atau *peasant communities*, dan masyarakat perkotaan yang kompleks atau *urban complex societies*. Selanjutnya, berdasarkan kompleksitas mereka, berbagai suku-bangsa di Indonesia terbagi ke dalam tiga tipologi, yaitu: a) masyarakat rumput atau *tribal communities*, b) komunitas kecil atau *little communities*, dan c) komunitas kompleks atau *complex communities*.

Sekalipun masyarakat pemburu dan peramu pada sebagian besar tempat di dunia semakin kecil jumlahnya, tetapi di Indonesia masih terdapat sejumlah penduduk yang hidup sebagai pemburu dan peramu hasil hutan, antara lain penduduk di Lembah Baliem di Irian Jaya, penduduk di sekitar daerah danau di Paniai Irian Jaya, dan Suku Anak Dalam atau orang Kubu di Sumatra. Mereka belum mengenal budidaya tanaman, dan hidup berkelompok dalam

wariskan kepada keturunannya, demikian seterusnya. Pewarisan kebudayaan makhluk manusia, tidak selalu hanya terjadi secara vertikal atau kepada anak-cucu mereka; melainkan dapat pula dilakukan secara horizontal atau manusia yang satu dapat belajar kebudayaan dari manusia lainnya. Berbagai pengalaman makhluk manusia dalam rangka kebudayaannya, akan diteruskan kepada generasi berikutnya atau dikomunikasikan dengan individu lainnya karena ia mampu mengembangkan gagasan-gagasannya dalam bentuk lambang-lambang vokal berupa bahasa; serta dikomunikasikan kepada orang lain dengan kepanaiannya berbicara dan menulis.

Kebudayaan berkembang secara akumulatif, dan semakin lama bertambah banyak serta kompleks. Untuk meneruskannya dari generasi ke generasi, diperlukan suatu sistem komunikasi yang jauh lebih kompleks daripada yang dimiliki binatang, ialah berupa bahasa, baik lisan, tertulis maupun dalam bentuk bahasa isyarat. Agar suatu kebudayaan dapat merespon berbagai masalah kelangsungan hidup makhluk manusia dan tetap dipelajari oleh generasi berikutnya, serta tetap 'lestari'; maka suatu kebudayaan harus pula mampu mengembangkan

dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan pokok para individu.

Kebudayaan mengenal ruang, tempat tumbuh dan berkembang; serta mengalami perubahan; penambahan dan pengurangan. Manusia tidak berada pada dua tempat atau ruang sekaligus, dan ia hanya dapat pindah ke ruang lain pada masa yang berbeda. Pergerakan ini telah berakibat pada persebaran kebudayaan, dari masa ke masa, dan dari satu tempat ke tempat lain. Sebagai akibatnya, di berbagai tempat pada waktu yang bersamaan maupun berlainan, dimungkinkan adanya unsur-unsur persamaan di samping perbedaan-perbedaan. Karenanya itu di luar masanya, suatu kebudayaan dipandang ketinggalan zaman atau anakronistik, dan di luar tempatnya dipandang asing atau janggal.

Identitas masa dan ruang mempunyai makna penting dalam persoalan kebudayaan. Sebuah negara modern, yaitu *nation state* bukan hanya berwujud sebuah unit geopolitik semata, tetapi dalam kenyataannya senantiasa mengandung keragaman kelompok sosial dan sistem budaya yang tercermin pada keanekaragaman kebudayaan suku-bangsa dan *sub culture*. Melalui perjalanan sejarah,

berbagai proses kehidupan manusia telah melahirkan ciri keanekaragaman bentuk budaya.

Keanekaragaman kebudayaan di Indonesia, diperkaya oleh kehadiran pendukung kebudayaan dari bangsa-bangsa lain. Sejak berabad-abad yang lalu, karena penjajahan, hubungan perdagangan, penyebarluasan agama, eksploitasi kekayaan alam, dan untuk berbagai tujuan lain. Selain oleh orang Portugis dan Belanda, kawasan Nusantara telah didatangi oleh orang-orang dari Cina-Daratan, India dan Arab. Banyak di antara mereka itu, akhirnya menetap di Nusantara. Selama ratusan tahun keberadaannya di Nusantara; lahirilah generasi keturunan mereka yang sebagian besar kini telah menjadi warganegara Indonesia. Kehadiran mereka, di samping telah memperkaya kebudayaan di Indonesia dan merupakan suatu potensi yang bermanfaat dalam pembangunan; juga mengandung potensi konflik sehingga merupakan masalah dalam rangka mengasimilasikannya ke dalam suatu integrasi nasional di Indonesia.

Keanekaragaman Suku-Bangsa di Indonesia

Berbagai suku-bangsa di Indonesia, di samping dapat dibedakan berdasarkan sistem mata pencaharian hidupnya, juga da-

pat dibedakan menurut kompleksitas mereka (Koentjaraningrat, 1963). Berdasarkan sistem mata pencaharian hidupnya, ada enam klasifikasi, yaitu: a) masyarakat pemburu dan peramu atau *hunting and food gathering societies*; b) masyarakat peternak atau *pastoral societies*, c) masyarakat peladang atau *shifting cultivators societies*, d) masyarakat nelayan atau *fishing communities*, e) masyarakat petani-pedesaan atau *peasant communities*, dan masyarakat perkotaan yang kompleks atau *urban complex societies*. Selanjutnya, berdasarkan kompleksitas mereka, berbagai suku-bangsa di Indonesia terbagi ke dalam tiga tipologi, yaitu: a) masyarakat rumput atau *tribal communities*, b) komunitas kecil atau *little communities*, dan c) komunitas kompleks atau *complex communities*.

Sekalipun masyarakat pemburu dan peramu pada sebagian besar tempat di dunia semakin kecil jumlahnya, tetapi di Indonesia masih terdapat sejumlah penduduk yang hidup sebagai pemburu dan peramu hasil hutan, antara lain penduduk di Lembah Baliem di Irian Jaya, penduduk di sekitar daerah danau di Paniai Irian Jaya, dan Suku Anak Dalam atau orang Kubu di Sumatra. Mereka belum mengenal budidaya tanaman, dan hidup berkelompok dalam

jumlah yang relatif tidak banyak. Bersama-sama dengan penduduk yang masih hidup sebagai peladang berpindah-pindah atau *slash and burn agriculture*, seperti orang Togutil di Halmahera Tengah; mereka sering diklasifikasikan sebagai 'masyarakat terasing'. Kategorisasi bahwa suatu komunitas atau suku-bangsa diklasifikasikan sebagai kelompok masyarakat terasing, di samping mereka itu tinggal di suatu lokasi yang jauh dari jangkauan alat transportasi, biasanya juga didasarkan atas tingkat kesejahteraan dan kemajuan, terutama yang berkaitan dengan proses akulturasi dan sikap mereka terhadap inovasi. Berbagai komunitas lain yang juga diklasifikasikan sebagai masyarakat terasing, antara lain orang Laut yang mengembara di sepanjang laut Kepulauan Riau dan Bajo di kawasan pantai di Sulawesi Utara, orang Badui di Banten Jawa Barat, orang Donggo di pedalaman pegunungan Sumbawa Timur, orang Amma Toa di Sulawesi Tengah, dan sebagainya.

Sementara itu, di kalangan ilmuwan sosial, termasuk para ahli antropologi, masih terdapat perbedaan dalam mengartikan konsep suku-bangsa sehingga berapakah tepatnya masing-masing jumlah suku-bangsa di Indonesia, masih bersimpang siur. Ada yang mengatakan bahwa di

Indonesia terdapat sekitar 300 suku-bangsa, dan ada pula yang mengatakan jauh lebih banyak dari jumlah tersebut.

Koentjaraningrat (1982:346-347) menilai bahwa sampai saat ini berapakah sebenarnya masing-masing jumlah suku-bangsa di Indonesia, masih sukar ditentukan secara pasti. Hal ini antara lain disebabkan oleh ruang lingkup istilah konsep suku-bangsa dapat mengembang atau menyempit, yaitu tergantung subyektivitas. Sebagai contoh, paling sedikit di Pulau Flores terdapat empat suku-bangsa yang berbeda bahasa dan adat-istiadat, ialah orang Manggarai, Ngada, Ende-Lio dan Sikka. Namun kalau ada di luar Pulau Flores, biasanya mereka diklasifikasikan oleh suku-bangsa lainnya sebagai orang Flores atau suku-bangsa Flores. Hal yang sama juga terjadi di kalangan suku-suku-bangsa Dayak di Pulau Kalimantan. Menurut H.J. Malinckrodt, orang Dayak diklasifikasikan ke dalam enam rumpon atau *stammen ras*, ialah Kenyah-Kayan-Bahau, Ot Danum, Iban, Moeroet, Klemantan dan Poenan. Jika diamati lebih lanjut, di kalangan orang Dayak Kalimantan terdapat 405 'suku' yang saling berbeda satu dengan lainnya. Apabila mereka berada di luar Pulau Kalimantan, orang lain atau mereka sendiri cen-

Tabel 1. Distribusi Penduduk Hindia-Belanda Pada 1860-1930 (dalam ribuan) Klasifikasi Berdasarkan 'Kebangsaan'

Tahun	Bumiputera	Eropa	Cina	Arab	Asia lainnya	Total
Jawa dan Madura						
1860	12.514	...	149	6
1870	16.233	37	175	8
1880	19.541	44	207	11
1890	23.609	55	242	14
1900	28.368	72	277	18
1905	29.979	73	295	19
1920	34.429	134	384	28	3	34.978
1930	40.981	193	582	42	11	41.71
Total Indonesia						
1860	44	221	9
1870	49	269	13
1880	60	344	16
1890	74	461	22
1900	91	537	27
1905	37.384	95	563	30
1920	48.300	168	809	45	22	49.344
1930	59.138	240	1.233	71	45	60.727

Sumber: Statistical Pocket Book of Indonesia, Batavia, 1941, hlm.5, dikutip Purcell (1964:386).

Tabel 2. Distribusi Berbagai Suku-Bangsa di Indonesia Pada 1974 dan 1995

Suku-Bangsa/Golongan	Tahun 1974		Tahun 1995
	Jumlah	%	Jumlah (juta)
Jawa	55.000.000	45,8	89.3
Sunda	17.000.000	14,1	27.7
Madura	8.600.000	7,1	14.0
Minangkabau	4.000.000	3,3	7.0
Bugis dan Makassar	3.066.000	2,5	5.0
Batak	2.414.000	2,0	4.0
Bali	2.222.000	1,8	4.0
24 Suku-Bangsa Lainnya	24.448.000	20,3	39.0
Cina	3.250.000	2,7	5.0
	120.000.000	100,0	195.0

Sumber: Pagkakaisa Research, Philipina, No.38. Dijelaskan pula bahwa angka-angka untuk Indonesia diambilkan dari makalah yang ditulis oleh Melly G.Tan, yang dibacakan pada ASAIHL Conference di Manila pada 9 Mei 1974.

Catatan: Untuk angka 1995, dibuat oleh penulis dengan memperkirakan selama 21 tahun, penduduk Indonesia naik dari 120 juta menjadi 195 juta; jadi ada kenaikan 75 juta.

derung lebih mengidentifikasi dirinya sebagai suku-bangsa Dayak; sekalipun di antara satu dengan yang lain merasa memiliki perbedaan.

Di antara sekitar 210 juta orang penduduk Indonesia dewasa ini, sulit diketahui secara pasti distribusi jumlah dari masing-masing suku-bangsa. Terakhir kalinya, Sensus Penduduk di Indonesia yang memuat items suku-bangsa adalah yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda; yang hasilnya dimuat dalam *Volkstelling* pada tahun 1930. Sensus Penduduk Indonesia yang dilakukan pada 1961 dan pada dasawarsa berikutnya, tidak pernah mencantumkan items suku-bangsa. Mengingat hal tersebut, ada kesulitan untuk mengetahui secara pasti jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Indonesia berdasarkan suku-bangsa dan distribusi mereka.

Indonesia sebagai Negara Bangsa

Ada pendapat yang mengatakan bahwa kata Indonesia pertama kali dipakai oleh seorang Jerman Adolf Bastian dalam bukunya, *Indonesien oder die Inseln des Malayischen Archipel* (1884). Sementara itu pendapat lain mengatakan bahwa penggunaan kata Indonesia telah ada sebelumnya, yaitu dipakai oleh

seorang sarjana etnologi dari Inggris J.R. Logan dalam tulisannya "*The Ethnology of the Indian Archipelago*" yang dimuat dalam *Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia* pada 1850. Akira Nagazumi (1976) berpendapat bahwa masalah bilamanakah, dan oleh siapakah kata Indonesia pertama kalinya dipergunakan, kurang begitu penting daripada implikasi penggunaan kata 'Indonesia' dan 'orang-orang Indonesia' dalam arti politis. Sampai dengan menjelang akhir abad XIX, identifikasi diri sebagai 'Indonesia' masih tetap relevan dikaji; terutama untuk kepentingan eksistensi dari sebuah *nation state* atau negara bangsa.

Jauh sebelum kolonial, tidak ada satu istilah kata yang mencakup wilayah kepulauan negara Republik Indonesia; juga tidak untuk suatu tujuan praktis dari kata tersebut. Pada awal kedatangan Belanda untuk berdagang, kawasan ini disebutnya Indie atau India yang diterjemahkan dari bahasa Inggris "*Indies*". Serupa dengan kata tersebut, muncul pula istilah lain ialah Achter-Indie atau Hindia-Belakang yang berbeda dengan Voor-Indie atau Hindia-Muka atau India sekarang. Akan tetapi sampai dengan abad XVII, sebutan Achter-Indie mencakup wilayah yang lebih luas daripada

pengertian Asia Tenggara pada dewasa ini, ialah di tambah Tibet di barat laut dan wilayah Cina Selatan di bagian timur-laut; termasuk seluruh wilayah di Laut Cina dan Teluk Bengali. Selain itu, sampai dengan akhir abad XIX juga dipakai istilah *Indische Archipel* atau Kepulauan Indie; dan pada baru pada 1910 secara resmi seluruh wilayah daerah jajahan Belanda di Indonesia disebut dengan *Nederlandsch-Indie*; dan penduduk pribumi yang berada di sana disebut dengan *Inlanders* bumiputera.

Bagi kaum nasionalis, istilah *Nederlandsch-Indie* memiliki konotasi menghina karena seolah-olah orang Jawa atau Sunda merupakan *natives* atau *aborigines* dari Negeri Belanda. Sebelum muncul kata Indonesia yang disetujui oleh kaum nasionalis, Eduard Douwes Dekker pernah mengusulkan '*Insulinde*', yaitu sebagai alternatif pengganti kata *Inlanders*; sekalipun sebutan tersebut juga kurang dapat diterima. Sementara itu, seiring dengan diterimanya kata 'Indonesia' pada 1920-an, muncul pula kata 'Nusantara'.

Nagazumi mengatakan kata 'Nusantara' yang berarti daerah ribuan, pertama kalinya diperkenalkan dalam pidato Soekarno pada 1917 pada pembentukan *Verbond van Studeerenden* atau

Perserikatan Para Mahasiswa; lebih populer dibandingkan *Insulinde*. Multatuli atau E.F.E. Douwes Dekker, juga memakai kata Nusantara, demikian pula, B.H.M. Vlekke memberi nama karya sejarah Indonesia dengan judul Nusantara pada 1943 (*Nusantara: A History of the East Indian Archipelago*). Pada 1951, Armijn Pane memperluas konsep Nusantara melampaui batas-batas negara RI sekarang. Menurut ahli kesusasteraan Jawa C.C. Berg dan Theodore C. Th. Pegeaud; adalah kurang tepat memakai kata Nusantara sebagai pengganti Indonesia. Nusantara berarti 'pulau-pulau lain' dilihat sudut pandang (orang) Pulau Jawa.

Banyak para pejabat pemerintah kolonial Belanda, kurang senang dengan pemakaian kata Indonesia karena mengandung makna pernyataan memberontak. Sementara itu J.J. Schrieke pada 1929 pernah mengatakan bahwa penggunaan kata tersebut merupakan cerminan kebangkitan nasionalisme Indonesia.

Kata Indonesia adalah mengekspresikan identitas, baik politik maupun budaya. Sementara itu, agaknya disepakati bahwa fokus utama kajian etnisitas atau kesukubangsaan adalah dikaitkan dengan masalah identitas, terutama yang dikaitkan dengan

solidaritas dan loyalitas seseorang sebagai anggota. Untuk memahami berbagai permasalahan yang ada, Parsons (1976) menganjurkan hendaknya dikaitkan dengan latar belakang sejarah. Hal tersebut penting artinya, apalagi jika dikaitkan konsepsi ideal tentang penduduk dalam sebuah negara. Menurut Hans Kohn yang dikutip oleh Talcott Parsons, sebuah *nation state* adalah "..... a politically organized society which historically enjoyed a legitimated claim to independence."

Revolusi Integratif dan Negara Bangsa Indonesia

Melemahnya semangat integrasi yang disertai oleh menguatnya loyalitas serta solidaritas primordial berdimensi politik; tidak jarang dapat menggiring suatu bangsa yang majemuk ke dalam sikap bermusuhan di kalangan mereka. Berbagai konflik yang berdimensi etnisitas tersebut, kesemuanya itu akhirnya akan bermuara kepada disintegrasi suatu negara-bangsa (*nation state*), dengan tuntutan pembagian wilayah sehingga akan memungkinkan munculnya negara nasional baru yang lebih homogen.

Dalam tulisannya mengenai heterogenitas politik suku-bangsa di Indonesia, William Liddle (1970:4-5) mengidentifikasi

ada dua jenis penghalang dalam integrasi nasional, ialah (1) yang berakar pada dimensi pembelaan horizontal, yaitu perbedaan suku-bangsa, ras, agama dan geografis; dan (2) pada tingkat vertikal berupa perbedaan latar belakang pendidikan elite kota yang berpendidikan, dan massa pedesaan yang berpandangan tradisional. Sementara itu, sifat majemuk dari bangsa Indonesia, di samping merupakan kebanggaan hendaknya pula dicermati bahwa keanekaragaman suku-bangsa dan kebudayaan tadi mengandung potensi konflik. Karenanya untuk menuju suatu integrasi nasional Indonesia yang kokoh, ada sejumlah kendala yang harus diperhatikan. Dalam rangka mempersatukan penduduk Indonesia yang beraneka-warna, Koentjaraningrat (1982: 345-346) melihat ada empat masalah pokok yang dihadapi, ialah (a) mempersatukan aneka-warna suku-bangsa, (b) masalah hubungan antarumat beragama, (c) masalah hubungan mayoritas-minoritas dan (d) integrasi kebudayaan di Papua dalam rangka kebudayaan di Indonesia.

Sementara itu dalam konteks revolusi integratif sebagai suatu bangsa, ada dua kekuatan utama yang saling bersaing, ialah rasa primordial atau *primordial sentiment*, dan kesadaran politik

atau *civil politics* (Geertz, 1963). Revolusi integratif adalah 'berhimpunnya berbagai kelompok primordial-tradisional ke dalam unit kemasyarakatan yang lebih besar dan tersebar. Sebelumnya kelompok tadi berdiri sendiri-sendiri, dan kemudian harus memiliki suatu kerangka acuan dalam lingkup 'bangsa' di bawah perlindungan suatu pemerintahan baru. Untuk itu, perlu pemahaman terhadap unsur-unsur kesuku-bangsaan dan ras dalam sistem perekonomian dan politik; terutama dinamika ikatan primordial secara historis dalam konteks sistem politik dan perekonomian berbagai suku-bangsa.

Sebagai ciptaan dan warisan hidup bermasyarakat, dan melalui perjalanan sejarah, aneka-warna suku-bangsa di Nusantara, menjelma menjadi bangsa Indonesia. Secara *weltanschauung*, bangsa ini diikat oleh visi dan idealisme yang diharapkan mampu berfungsi sebagai sistem nilai dan institusi teras (*core*) suatu bangsa (*nation state*). Karenanya sifat fragmentasi dari etnisitas dalam sistem kekuasaan, perlu dicermati agar tidak menuju terjadinya disintegrasi bangsa.

Sebuah negara modern bukan hanya terwujud dalam sebuah unit geopolitik semata, tetapi juga mengandung keragaman kelompok sosial dan sistem so-

sial-budaya yang berasal dari aneka-warna suku-bangsa (*sub national culture*). Karenanya berbagai pola fragmentasi, baik berdasarkan kesuku-bangsaan, agama, orientasi politik dan sebagainya, perlu dicermati agar tidak menuju disintegrasi.

Sebuah negara modern (*nation state*), bukan hanya terwujud dalam sebuah unit geopolitik semata. Dalam kenyataannya juga mengandung keragaman kelompok sosial dan sistem sosial-budaya yang berasal dari aneka-warna suku-bangsa (*sub national culture*). Melalui perjalanan sejarah, berbagai proses kehidupan manusia telah melahirkan ciri-ciri dari keanekaragaman bentuk budaya.

Suku-Bangsa dan Etnisitas

Istilah *ethnic* atau yang diterjemahkan ke dalam istilah suku-bangsa, berasal dari kata Yunani *eOvikos* yang artinya *heathen* atau penyembah berhala atau orang yang tidak ber-Tuhan. Dalam bahasa Yunani, istilah itu sendiri berasal dari akar kata *eOvos* ("*ethnos*") yang diterjemahkan sebagai *nation* atau bangsa, yaitu suatu istilah yang lazim dipakai untuk menunjuk pada bangsa-bangsa yang bukan Israel. Dengan kata lain, menurut *The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles*, ada dua pengertian yang ter-

menunjuk kepada bangsa-bangsa yang non Kristen atau non Yahudi, dan (b) menunjuk kepada bangsa yang masih menyembah berhala.

Dalam perkembangan berikutnya, istilah itu dikenal luas setelah dipakai secara resmi dalam lembaga yang didirikan pada 1843 di London, ialah *Ethnological Society*; yaitu menyerupai lembaga yang dibentuk di Paris lima tahun sebelumnya, ialah *Societe Ethnologique de Paris* serta yang dibentuk di New York pada *American Ethnological Society* pada 1842. Lloyd Warner dalam tulisan Brian M. du Toit et al. (1978:3) menjelaskan bahwa yang terkandung dalam pengertian *ethnic* menunjuk pada individu-individu dalam mempertimbangkan di manakah dirinya termasuk atau dimasukkan sebagai anggota, adalah didasarkan atas latar belakang kebudayaan. Oleh karena itu istilah *ethnic* cenderung lebih bersifat sosio-kultural daripada yang berkaitan dengan ras.

Dalam *Dictionary of Sociology* dari G. Duncan Mitchell's (Chicago, Aldine, 1968), tidak ditemukan entri kata *ethnic groups* maupun *ethnicity*, dan bahkan juga tidak ditemukan pembatasan arti dalam entri kata *ethnocentrism*. Demikian pula halnya dalam *Handbook of Sociology* yang terbit

ward Byron Reuter (New York, Dryden Press); serta dalam *Modern Dictionary of Sociology* dari George A. dan Achilles G. Theodorsson (New York, Thomas Y. Crowell, 1969); tidak ditemukan entri kata *ethnic group* tetapi ada entri kata *subgroup* yang pengertiannya agak mendekati arti kata *ethnic group*; yang didefinisikan sebagai "..... a group with a common cultural tradition and a sense of identity which exists as a subgroup of a larger society". Dalam konteks tersebut George dan Achilles tidak menganjurkan bahwa ruang lingkup istilah *ethnic group* dapat diterapkan bagi suatu kelompok yang memiliki perbedaan asal usul dan tradisi kebudayaan, sekalipun kelompok tersebut merupakan mayoritas dalam suatu negara. Oleh karenanya, seperti dalam konteks orang Amerika di masa lalu (*old Americans*) yang merupakan keturunan Anglo-Saxons, dapat dianggap sebagai *ethnic groups*.

Salah satu batasan lain dari pengertian *ethnic-group*, misalnya juga dikemukakan oleh Schemerhorn (1970:12), yaitu "..... merupakan kolektiva dalam suatu masyarakat yang lebih luas, yang memiliki persamaan asal nenek-moyang, baik secara nyata maupun semu, yang mempunyai pengalaman sejarah sama dan suatu kesa-

maan fokus budaya yang terpusat pada unsur-unsur simbolik dalam bentuk yang melambangkan sebagai suatu 'persamaan bangsa', misalnya persamaan ciri-ciri fenotipe, religi, bahasa, pola kekerabatan, 'nasionalitas', afiliasi kesukubangsaan atau gabungan dari semua itu. Dengan demikian dapat dipahami jika konsepsi suku-bangsa dapat menyempit, misalnya hanya berdasarkan persamaan bahasa atau dialek; dan sebaliknya dapat pula melebar karena terkandung berbagai variabel lainnya.

Definisi Schemerhorn (1970:12) memberikan label suku-bangsa dengan menampilkan beberapa variabel yang dipandang sebagai identitas seperti kesamaan leluhur, kesamaan andil dan peran kesejarahan, kesamaan fokus budaya atau satu atau lebih unsur-unsur simbolik yang dijadikan simbol kebersamaan mereka. Selain itu, karena studi Schemerhorn tentang suku-bangsa dilakukan di tingkat mikro; ia juga mengkaitkan konsep suku-bangsa ini dengan masalah golongan minoritas, nasionalisme, *tribalism*, *cultural pluralism*, dan sebagainya.

Etnisitas atau *ethnicity* juga merupakan istilah yang relatif baru. Konotasi arti yang terkandung dalam istilah tersebut lebih dipergunakan untuk menunjuk kandungan sifat-sifat atau kualiti

tas kesuku-bangsaan. Karena itu, etnisitas dapat pula diartikan sebagai 'kesuku-bangsaan'. Dalam *Oxford English Dictionary* yang terbit pada 1933, istilah tersebut belum dijumpai tetapi baru muncul dalam edisi tambahan dari *Oxford English Dictionary* yang terbit pada 1972. Di sana dijelaskan bahwa yang pertama kali memakainya adalah David Riesman pada tahun 1953 dalam *Webster's New English Dictionary International* jilid III yang terbit pada 1961. Lebih lanjut juga dikemukakan bahwa istilah etnisitas tidak ditemukan dalam *Dictionary of the English* terbitan Random House 1966, dan tidak juga dijumpai dalam *American Heritage Dictionary of the English Language* 1969. Istilah tadi baru terdapat pada *American Heritage Dictionary* edisi 1973, yang dikatakan berarti (1) kondisi yang dimiliki oleh suatu suku-bangsa, dan (2) rasa harga diri suku-bangsa. Agaknya, kedua pengertian tersebut akan selalu mengalami perubahan. Jika diamati, pengertian pertama adalah lebih sesuai dalam anggapan Nathan Glazer dan Moynihan, karena lebih menggambarkan kondisi obyektif (1976:1); sedangkan pada pengertian kedua dikaitkan dengan 'harga diri', yang sebenarnya adalah bersifat subyektif.

Pada hakikatnya, berbagai konsepsi *ethnic-group* atau suku-

dan dipangkal dari konsep budaya (Knutsson, 1970:98), karenanya keanekaragaman suku-bangsa juga tergantung bagaimana dan dari sudut manakah kebudayaan didefinisikan. Semakin beranekarwarnanya suku-bangsa di suatu negara, maka semakin banyak terdapat variasi perbedaan kebudayaan. Karenanya jika hanya berdasarkan konsepsi suku bangsa semata, kiranya tidak cukup dipakai untuk menganalisis etnisitas. Berbagai perbedaan yang ada, tidak selalu dapat dianggap sebagai etnisitas sepanjang di antara mereka terjadi efektivitas relasi yang mencerminkan suatu tinggi-rendahnya level integrasi sosial. Dengan kata lain, bahwa fenomena utama dari masalah etnisitas atau yang dianggap sebagai masalah kesuku-bangsaan apabila interrelasi mereka cukup rendah. Karena itulah Epstein (1978:93) cenderung menilai bahwa etnisitas adalah lebih merupakan fenomena politik, "..... *ethnicity is essentially a political phenomenon, involving a struggle for power among ethnic groups in furtherance and defence of their collective interest*". Lebih lanjut ia juga mengatakan bahwa dalam konsepsi etnisitas terkandung pemahaman sebagai berikut.

"..... *it various interactional contexts, or dichotomization are part*

egies for pre serving or increasing control of resources, social status or other value a meaningful interpretation feasible;..... ethnicity becomes not one single universally applicable term but rather the representation of a wide range of interrelation in which the dominant reference is to an ethnic status ascribed on the basis of birth, language, and socialization".

Sementara itu Cohen (1969) juga berpendapat bahwa politisasi hubungan antar suku-bangsa lebih merupakan suatu perjuangan dari suku-bangsa tertentu untuk mendapatkan *power* dan *priviledges* dengan memanfaatkan *cultural tradition* sebagai senjata perjuangannya.

Studi mengenai *ethnicity* juga sering dikaitkan dengan derajat konformitas dari anggota suatu kolektiva (suku-bangsa) dalam menerima norma-norma tertentu dari suatu proses interaksi sosial. Oleh karenanya para ahli antropologi seperti Mitchell (1956), Epstein (1958), Gluckman (1961) dan Barth (1969); sering mengkaitkan studi mengenai *ethnicity* dengan perbedaan latar belakang kebudayaan dari suatu kolektiva tertentu, terutama yang menunjuk pada aspek mendasar yang bersifat primordial. Hal ini dikarenakan ada kecenderungan bahwa pengelompokan dalam suatu suku-bangsa tertentu

sering dipakai oleh seseorang guna mengidentifikasikan dirinya karena ada pihak pihak lain yang juga sering mengidentifikasikan bahwa perilaku seseorang itu adalah terkait dengan latar belakang suku-bangsanya.

Untuk melihat ruang lingkup label etnisitas, Nathan melontarkan gagasan yang mendasarkan pada berbagai peristiwa yang akhir-akhir ini bermunculan di dunia. Kata baru tersebut lebih mencerminkan realitas dan pemakaian baru sebagai cerminan perubahan suatu realitas. Istilah baru tadi adalah etnisitas yang merupakan perluasan arti dari istilah *ethnic group* yang mencakup minoritas, subgroup marginal yang merupakan masyarakat pinggiran, kelompok yang diharapkan melakukan asimilasi, kelompok yang akan dihilangkan (*to disappear*), kelompok untuk dilestarikan keberadaannya (*to continue as survivals*), kelompok yang eksotik maupun yang menyebalkan (*troublesome*); yang kesemuanya itu ditujukan untuk menuju pada sesuatu yang lebih besar dari masyarakat.

Studi etnisitas penting bagi suatu negara plural, agar keanekaragaman suku-bangsa dapat dikembangkan sebagai strategi nasional ke arah terwujudnya integrasi nasional. Nasionalisme yang dikembangkan tentunya membutuhkan adanya saling

pengakuan loyalitas dan solidaritas di antara kebudayaan yang berbeda, seperti dikemukakan oleh Ernest Gellner (1984:6), bahwa kriteria dalam suatu integrasi nasional sebaiknya sebagai berikut.

"(1) *Two men are of the same nation if and only if they share the same culture, where culture in turn means a system of ideas and sign and associations and way of behaving and communicating*; (2) *Two men of the same nations if and only if they recognize each other as belonging to the same nation. In other words, nations make the man, nation are the artefacts of men's convictions and loyalties and solidarities*.

Untuk menuju bagian dari masyarakat yang lebih luas, misalnya sebagai satu *nation state*, pada dasarnya ada tiga masalah pokok yang dibahas dalam etnisitas. Pertama, garis pembatas di masa lalu, misalnya religi, bahasa, dan afiliasi politik; yang masih potensial bagi munculnya konflik. Kedua, apa dan bagaimana sebenarnya bentuk-bentuk konflik baru di kalangan mereka, termasuk konflik di antara suku-bangsa 'mayoritas' dan 'minoritas'. Apakah mereka saling bertikai disebabkan oleh kebutuhan akan penghargaan (*prestige*), kehormatan (*respect*), hak-hak sipil (*civil rights*), kekuasaan

politik (*political power*), ataukah akses terhadap perekonomian (*access to economic opportunity*). Ketiga, studi tentang etnisitas tidak hanya sekedar dikaitkan dengan masalah mengejar sesuatu kesempatan semata, melainkan juga berkaitan dengan suatu ideologi dan kepentingan tertentu. Karenanya, kehadiran suatu etnisitas merupakan pula cerminan revivalisme identitas suatu suku-bangsa yang sering disebut pula sebagai '*primordialism*'. Identitas yang mendasar dari suatu suku-bangsa tadi oleh C. Geertz disebut dengan '*primordial affinities and attachments*', yang dimiliki seseorang sejak lahir atau dimiliki karena kelahirannya (*ascribed*), seperti kesamaan hubungan kekerabatan dan pertalian darah, kelahiran, bahasa, dan merupakan *candidate for nationhood*'.

Ikatan primordial adalah berlawanan dengan kesadaran kewarganegaraan (*civil sense*). Dalam konsep kesadaran kewarganegaraan terkandung gagasan mengenai kepentingan publik yang seringkali bertolak belakang dengan kepentingan pribadi. Atas dasar itu muncullah perilaku politik modern rasional yang lebih menekankan pada kepentingan umum. Karenanya dalam suatu revolusi integratif, terjadilah suatu proses di mana

berubah dari lingkup lokal ke supra lokal (*nation state*), yaitu ke arah kesatuan politik yang lebih besar dan lebih kompleks pengorganisasiannya. Berbagai kesatuan politik yang sebelumnya berskala kecil yang memiliki otonomi yang relatif dan bersifat *primordial* dan *integrated*, harus berubah ke arah kesatuan politik baru yang memiliki ciri yang berbeda, yaitu yang memisahkan antara kepentingan umum dan pribadi yang berbeda dengan ciri politik primordial. Karenanya akan terjadi ketegangan antara sistem politik kenegaraan (*civil politics*) dengan sistem politik primordial; atau terjadinya suatu proses integratif. Sebagai akibatnya muncul pula sesuatu yang dipertentangkan, di satu pihak ingin tetap mempertahankan identitas, terikat pada pertalian darah, tempat tinggal, agama dan tradisi; sementara itu ada tuntutan praktis kemajuan, antara lain dimilikinya orde politik yang lebih efektif dan untuk meningkatkan taraf kehidupan. Sebagai akibatnya, jika kedua hal itu muncul bersamaan, maka dalam pengalaman negara-negara yang baru merdeka, penyelesaian ketegangan tersebut diwarnai politik primordial seperti ekstrim kedaerahan, rasialisme dan komunalisme. Jika ini terjadi, tidak jarang akan memunculkan suatu sistem nasional yang ter-

diri dari 'kubu-kubu suku-bangsa' dalam wujud hadirnya suatu jaringan persekutuan dan persaingan yang dilandasi sentimen rasa bangga dan saling curiga-mencurigai. Biasanya, sumber ketegangan berupa pemaksaan kehidupan politik pemerintahan (*civil politics*) 'modern' terhadap politik primordial; sementara itu logika politik primordial dianggap tak rasional.

Selanjutnya, Geertz (1964) berpendapat bahwa etnisitas merupakan salah satu bentuk ideologi tertentu. Dalam konteks tersebut ia mendefinisikan ideologi sebagai salah satu dari sistem budaya seperti halnya kepercayaan, filsafat, estetika, dan hukum. Ideologi merupakan image yang skematik dari suatu sosial order karena pada dasarnya manusia adalah *a political animal*. Etnisitas dapat dipandang sebagai "sistem simbol.... dan merupakan suara hati nurani kolektif". Jika ideologi adalah sistem budaya; secara logik ia merupakan subordinat dari kepercayaan dan bukan sebagai koordinat. Sebagai contoh ungkapan bahwa etnisitas sebagai ideologi; misalnya ungkapan 'sekali Jahudi tetap Jahudi'.

Semua manusia adalah makhluk hidup yang berkebudayaan, dan bahkan seseorang mengidentifikasi dirinya sebagai anggota dari suatu suku-bangsa

tertentu (Enloe, 1973). Karenanya etnisitas bukan hanya suatu bentuk yang melingkari individu tetapi ia juga terkait pada ikatan pekerjaan, daerah geografi, kelas sosial, agama, jenis kelamin, umur, ras dan ideologi. Setiap ikatan tadi, berbeda intensitasnya; karenanya adalah kurang tepat jika para peneliti cenderung mengklasifikasikan seseorang hanya berdasarkan atribut yang dipakainya. Di samping ditentukan oleh identifikasi diri seseorang, etnisitas tidak didasarkan kategorisasi obyektif, tetapi lebih di dasarkan atas persepsi orang lain.

Lebih lanjut ia juga berpendapat bahwa etnisitas lebih merupakan fenomena kolektif daripada perorangan, karenanya dapat dimanfaatkan oleh para elit politik untuk membangun strategi menjaga keamanan negara. Etnisitas lebih merupakan ekspresi kultural daripada didasarkan pada sistem nilai dan minat. Selain itu, etnisitas juga lebih bersifat emosional, karenanya dapat dipandang sebagai tipologi identitas yang didasarkan pada persamaan persepsi dan pengalaman masa lalu. Selanjutnya, etnisitas juga merupakan suatu konsep berfikir. Dalam konteks ini, sekalipun tidak semua kasus etnisitas memiliki dimensi internasional yang mampu melintas batas-batas negara: para elit poli-

tik tetap harus mampu membuat prediksi mengenai bagaimana sikap dan perilaku suatu suku-bangsa terhadap negara lain. Ini berarti apabila hal ini dapat dicermati maka etnisitas dapat dipakai untuk basis peta keamanan suatu negara.

Mengingat hal tersebut, sebagai langkah awal untuk mengantisipasi gejolak kesukubangsaan, Cynthia Enloe (1980:15-16) menganjurkan suatu model pemetaan. Lebih lanjut dikemukakan Enloe, bahwa pemetaan tadi antara lain meliputi; (1) Suku-bangsa yang dikategorikan sangat 'peka', dan biasanya bermukim di daerah-daerah perbatasan; (2) Berbagai suku-bangsa yang berperan dalam perekonomian; antara lain karena biasanya memiliki hak-hak istimewa; (3) Suku-bangsa yang memiliki potensi merubah tatatan politik yang ada; (4) Suku-bangsa yang memiliki potensi bersaing dengan negara asing; dan (5) Suku-bangsa yang memiliki akses terbesar dalam struktur yang telah terpola di negaranya.

Penutup

Eksistensi pluralisme suku-bangsa di Indonesia, selain mencerminkan kekayaan budaya bangsa juga membawa implikasi dalam kehidupan sosial-budaya dan bernegara. Karenanya, keanekaragaman suku-bangsa

dan golongan di Indonesia, di samping merupakan kebanggaan seharusnya pula disadari mengandung potensi konflik, baik bersifat latent maupun terbuka.

Guna menghindari pecahnya suatu negara-bangsa, diperlukan ikatan nasionalisme, yang pada hakikatnya merupakan mekanisme untuk mempertemukan dan mempersatukan berbagai aspirasi, baik sosial-budaya, ekonomi, politik dsb.nya. Sementara itu perlu kiranya disadari bahwa nasionalisme itu sendiri memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang, yaitu positif dan negatif. Bermakna positif apabila dapat diterapkan sebagai pengikat berbagai kelompok masyarakat dalam suatu negara bangsa, misalnya sebagai alat pembangunan. Sebaliknya bermakna negatif jika memunculkan kecenderungan yang kurang menguntungkan bagi perkembangan negara-bangsa itu sendiri, misalnya dalam bentuk pengunggulan suatu suku-bangsa tertentu yang akhirnya akan menyebabkan terjadinya disintegrasi.

Istilah *ethnic group* tidak dapat dipakai secara universal, karena itu perlu hati-hati dalam pemakaiannya. Dalam kenyataannya, banyak di kalangan il-muan sosial secara luas cenderung mempergunakan termi-

nologi *ethnic groups*, tidak hanya untuk menunjuk *subgroups* dan minoritas, dan bahkan juga untuk menunjuk semua kelompok-kelompok dalam masyarakat yang memiliki perbedaan kebudayaan dan berbeda keturunan. Oleh karena itu pula maka betapa luasnya refleksi pemahaman yang signifikan dikaitkan dengan etnisitas pada dewasa ini.

Daftar Pustaka

- Barth, Frederik, 1970, *Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference*, London, George Allen.
- Barth, Frederik, 1994, "Enduring and Emerging Issues in the Analysis of Ethnicity", dalam *The Anthropology of Ethnicity: Beyond Ethnic Groups and Boundaries*, Hans Vermeulen dan Cora Govers (ed.), Amsterdam, Het Spinhuis Publisher, Hlm.11-32.
- Cohen, Abner (ed.), 1974, *Urban Ethnicity*, Tavistock Publications, London-New York.
- Enloe, Cynthia H., 1973, *Ethnic Conflict and Political Development*, Boston, Little Brown and Company.
- Epstein, A.L., 1978, *Ethos and Identity: Three Studies in Ethnicity*, London, Tavistock Publication.
- Frazier, E.Franklin, 1957, *Race and Culture Contacts in the Modern World*, Boston, Beacon Press.

Geertz, Clifford, 1964, "Ideology as a Cultural System", dalam *Ideology and Discontent*, David Apter (ed.), New York, The Free Press, Hlm.47-76.

Gellner, Ernest, 1984, *Nations and Nationalism*, Basil Blackwell.

Glazer, Nathan dan Daniel P.Moynihan, 1976, *Ethnicity: Theory and Experience*, Massachusetts, Harvard University Press.

Knutsson, Karl Eric, 1970, "Dichotomization and Integration" dalam *Frederik Barth, Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference*, London, George Allen, Hlm.86-100.

Koentjaraningrat, 1963, *Atlas Etnografi Sedunia*, Jakarta, Penerbit Dian Rakyat.

Koentjaraningrat (ed.), 1982, *Masalah-Masalah Pembangunan: Bunga Rampai Antropologi Terapan*, Jakarta, LP3ES.

Koentjaraningrat, 1993, *Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia.

LeVine, Robert A. dan Donald T.Cambell, 1972, *Ethnoentrism: Theories of Conflict, Ethnic Attitudes and Group Behavior*, New York, John Wiley & Son Inc.

Liddle, William R., 1970, *Ethnicity, Party and National Integration: An Indonesian Case Study*, New Haven, Yale University Press.

- Linton, Ralph (ed.), 1945, *The Science of Man in the World Crisis*, New York, Columbia University Press.
- Martin, James G and Clyde W. Franklin, 1973, *Minority Group Relations*, Ohio, Charles E. Merrill Publishing Company.
- Michell, J.C., 1974, "Perceptions of Ethnicity and Ethnic Behavior: An Empirical Exploration", dalam *Urban Ethnicity*, Cohen, Abner (ed.), Tavistock Publications, London-New York, Hlm.1-36..
- Nagazumi, Akira, 1976, "'Indonesia' dan 'Orang-Orang Indonesia' dalam Indonesia: Masalah dan Peristiwa Bunga Rampai, Ichimura dan Koentjaraningrat (ed.), Jakarta, PT Gramedia, Hlm.1-26.
- Parsons, Talcott, 1975, "Some Theoretical Considerations on the Nature and Trends of Change of Ethnicity", dalam *Ethnicity: Theory and Experience*, Nathan Glazer dan Daniel P. Moynihan, Massachusetts, Harvard University Press, Hlm. 53-83.
- Pye, Lucian W., Gabriel A. Almond dan James S. Coleman, 1973, *Ethnic Conflict and Political Development*, Canada, Little Brown & Company.
- Sahlin, M.D., 1968, "Culture and Environment; The Study of Cultural Ecology", *Theory in Anthropology*, R.A. Manners dan D. Kaplan (ed.), London, Routledge & Kegan Paul, Hlm. 367-373.
- Schermerhorn, R.A., 1970, *Comparative Ethnic Relations: A Framework of Theory and Research*, New York, Random House.
- Simpson, George E. dan J. Milton Yinger, 1972, *Racial and Cultural Minorities: An Analysis of Prejudice and Discrimination*, New York, Harper and Row Publisher.
- Toit, Brian M. du (ed.), 1978, *Ethnicity in Modern Africa*, Westview Press, Colorado.
- Verdery, Katherine, 1994, "Ethnicity, Nationalism, and State-Making", dalam *The Anthropology of Ethnicity: Beyond Ethnic Groups and Boundaries*, Hans Vermeulen dan Cora Govers (ed.), Amsterdam, Het Spinhuis Publisher, Hlm. 33-58.